



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,  
BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,  
DJSN DAN BNP2TKI)

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI;
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Mei 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Program dan <i>grand design</i> Pemerintah bidang Ketenagakerjaan dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"><li>Pengawasan terhadap kondisi hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan dan seluruh kegiatan ketenagakerjaan;</li><li>Pemberlakuan Moratorium TKI sektor rumah tangga ke Timur Tengah Tahun 2018;</li><li>Peningkatan kepesertaan BPJS terhadap seluruh pekerja di Indonesia terutama pekerja kontrak dan outsourcing;</li><li>Penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar negeri, khususnya yang akan menghadapi hukuman mati dan kasus lainnya.</li></ol>
	: 2. Perkembangan program revitalisasi BLK dan BLK Luar Negeri di seluruh Indonesia Tahun 2014-2015;
	: 3. Kajian Pemerintah terkait persoalan regulasi lembaga untuk pembiayaan ( <i>cost structure</i> ) calon TKI/TKI ke luar negeri;
	: 4. Perkembangan dan kepastian besaran iuran dalam penyelenggaraan program jaminan pensiun yang wajib dilaksanakan per 1 Juli 2015.
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, MSc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI.  
B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 14.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung Menaker melakukan Wasnaker yang dilaksanakan secara bersama antara pusat dan provinsi melalui tindakan korektif yang terdiri dari tindakan preventif dan refresif.
2. Komisi IX DPR RI mendukung penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan ke Timur Tengah mulai tahun 2015, dengan catatan memberikan solusi menyiapkan lapangan kerja di dalam negeri.
3. Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan kepesertaan BPJS terhadap seluruh pekerja di Indonesia terutama pekerja kontrak dan outsourcing.
4. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan TKI bermasalah di LN, khususnya TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati
5. Komisi IX DPR RI mendukung pemerintah untuk segera melaksanakan program revitalisasi BLK dan BLK LN di seluruh Indonesia.
6. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi Hasil Panitia Kerja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI pada Oktober 2013.
7. Komisi IX DPR RI menyepakati untuk segera melaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi VI DPR RI dengan mengundang Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri BUMN dalam penyelesaian masalah outsourcing BUMN.

Rapat diakhiri pukul 17.55 WIB.

Menteri Ketenagakerjaan RI,



H. HANIF DHAKIRI

Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



H. SYAMSUL BACHRI S, MSc